



Siaran Pers  
Untuk Diberitakan Segera

## Diskusi Keamanan Laut: Pemerintahan Baru Harus Serius Tangani Ancaman Maritim Indonesia



Diskusi Maritim dengan Timses Paslon 01, 02, 03: Deteksi Keamanan Laut Indonesia Periode April 2023 - Januari 2024. (Foto: Muhammad Salachudin/IOJI)

**JAKARTA** - Selama April 2023 hingga Januari 2024, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) melakukan deteksi dan analisis terhadap beberapa bentuk ancaman keamanan maritim di wilayah perairan<sup>1</sup> dan yurisdiksi<sup>2</sup> Indonesia.

Ancaman keamanan maritim tersebut meliputi: (i) aktivitas riset ilmiah kelautan oleh kapal asing, (ii) pencemaran minyak (*oil spill*) lintas negara, dan (iii) dugaan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal ikan asing dan kapal ikan Indonesia.

<sup>1</sup> Wilayah perairan terdiri dari: laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

<sup>2</sup> Wilayah yurisdiksi terdiri dari: Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen dan Zona Tambahan.



Dalam melakukan deteksi, IOJI menggunakan sumber data resmi dan terbuka (*open sources*) dari berbagai lembaga terpercaya seperti data *Automatic Identification System*

(AIS), data perizinan kapal ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan data satelit (*Sentinel 1* dan *Sentinel 2*, dan *Unseenlabs*).

IOJI mendeteksi pergerakan Nan Feng dan Jia Geng, dua kapal riset kelautan berbendera Tiongkok di Laut Natuna Utara (LNU). Nan Feng terdeteksi berada di LNU pada 1-3 Mei 2023, sedangkan Jia Geng pada 29 April-1 Mei 2023. Nan Feng adalah kapal riset sumber daya perikanan, sedangkan Jia Geng berjenis *Moving Vessel Profiler* (MVP) yang dapat melakukan riset oseanografi dengan kecepatan tinggi.

IOJI juga mendeteksi pencemaran laut berupa tumpahan minyak dari kapal di perairan sebelah timur Johor, Malaysia pada 10, 16 dan 28 April 2023. Tumpahannya diduga kuat terbawa arus dan mencemari laut Indonesia (*transboundary pollution*) hingga ke wilayah pesisir Pulau Batam dan Pulau Bintan di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) masih menjadi ancaman besar bagi keamanan laut Indonesia. Temuan maraknya kapal ikan Vietnam yang diduga kuat melakukan *illegal fishing* di LNU didukung oleh informasi dari nelayan lokal. Pada 20 November 2023, nelayan di Natuna mendokumentasikan kapal ikan Vietnam di LNU sebelah timur. Menurut nelayan, lokasi kapal ikan Vietnam tersebut berjarak 49 mil dari Pulau Senua.

Kapal-kapal ikan berbendera Vietnam tersebut secara aktif melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap *pair trawl* di area tumpang tindih klaim ZEE antara Indonesia dan Vietnam dan bahkan jauh masuk ke wilayah selatan dari area tumpang tindih klaim ZEE.

Nelayan lokal Natuna, yang mata pencahariannya memang bergantung pada sumber daya perikanan LNU, merasakan dampak negatif dari operasi kapal ikan Vietnam tersebut. Hasil tangkapan mereka berkurang, yang memaksa nelayan melaut hingga ke ZEE Malaysia.

Salah satu tantangan utama Pemerintah Indonesia dalam usaha pemberantasan *illegal fishing* di LNU adalah kurangnya sarana, prasarana dan anggaran untuk melakukan patroli secara rutin dan terus-menerus.

Kesepakatan batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam pada Desember 2022 pun belum diikuti pengumuman resmi titik-titik koordinat batas keduanya, yang berpengaruh terhadap ketegasan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi LNU.

Selain di wilayah perairan dan yurisdiksi LNU, IOJI juga mendeteksi aktivitas yang patut diduga merupakan *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* di wilayah perairan Indonesia bagian timur. Berdasarkan data AIS, IOJI mendeteksi kapal angkut ikan Fu Yuan Yu F77 berbendera Tiongkok pada September hingga Desember 2023 yang bergerak dari Tual menuju Laut Arafura. Kapal ini juga melanggar hukum karena terdeteksi sempat mematikan AIS saat berada di Laut Arafura.



Mengacu pada temuan itu, IOJI merekomendasikan *3A+1 abilities*” dalam hal penegakan hukum di laut, masing-masing:

- 1) *ability to detect* - kemampuan pendeteksian aktivitas di laut yang cepat dan akurat dengan teknologi pemantauan multi-sumber data dan informasi yang terintegrasi antarkementerian dan lembaga.
- 2) *ability to respond* - kemampuan merespons dan/atau menindak tegas pelanggaran yang terjadi, di antaranya:
  - a) Menangkap kapal ikan asing yang tanpa izin menangkap ikan di ZEE Indonesia dan melanjutkan proses hukum ke tingkat penyidikan dan penuntutan;
  - b) Memastikan status perizinan riset kelautan oleh kapal riset asing, serta meminta klarifikasi kepada negara bendera kapal mengenai perlintasan kapalnya di ZEE Indonesia;
  - c) Menuntut pertanggungjawaban kapal-kapal pelaku pencemar di wilayah laut dan pesisir Indonesia
- 3) *ability to punish* - kemampuan menjatuhkan sanksi dan/atau hukuman yang memberikan efek jera terhadap pelaku ancaman keamanan laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional; dan
- 4) *ability to cooperate with international community* - kemampuan untuk mengatasi ancaman keamanan laut melalui kerja sama internasional, baik dengan pemerintah negara lain maupun dengan lembaga internasional yang secara khusus menangani isu ancaman laut terkait.

### **Pandangan Timses Paslon tentang Keamanan Laut**

Menyambut Pilpres 2024, IOJI menyuarakan kepada tim pemenangan masing-masing pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 01, 02 dan 03 agar memberikan perhatian serius terhadap isu keamanan laut dan, jika terpilih, agar konsisten membangun sistem keamanan laut Indonesia yang mumpuni.

Pandangan IOJI turut disampaikan dalam diskusi *hybrid* bertajuk “Diskusi Maritim dengan Timses Paslon 01, 02, 03: Deteksi Keamanan Laut Indonesia Periode April 2023-Januari 2024.” Diskusi terselenggara atas kerja sama antara IOJI dan Katadata Insight Center, lengan riset Katadata Indonesia pada 6 Februari 2024.

Dalam sambutan diskusi tersebut, *Chief Executive Officer* IOJI, Mas Achmad Santosa menyampaikan sistem keamanan laut yang tangguh dan responsif adalah prasyarat pembangunan berkelanjutan Indonesia. Sistem keamanan maritim, “harus mencakup aspek keamanan manusia (*human security*), keamanan nasional (*national security*), lingkungan hidup/ekosistem laut (*marine environment*), dan pembangunan ekonomi (*economic development*).”

Keempatnya, menurut Mas Achmad, “dapat menopang pertahanan dan keamanan bangsa.”



Merespons temuan IOJI tersebut, Laksamana Madya TNI (Purn) Achmad Djamaludin, anggota Dewan Pakar Tim Nasional paslon nomor urut 01 (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) mengingatkan “pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi dan organisasi internasional yang bergelut di laut.” “Kami akan mendorong penguatan keamanan maritim Indonesia melalui kerjasama multilateral, khususnya untuk menghadapi ancaman-ancaman non-tradisional.” Ide *Single Agency Multi Task* (SAMT) disuarakan oleh perwakilan tim pemenang paslon 01 melalui pembentukan *omnibus law* bidang kelautan. Kedua hal ini diyakini oleh Paslon nomor urut 01 dapat “memperkuat keamanan laut Indonesia,” kata Djamaludin.

Sementara itu Bobby Adhityo Rizaldi, anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai paslon nomor urut 02 menyatakan “keamanan laut berhubungan erat dengan keberlanjutan proses pembangunan menuju visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang sudah dilaksanakan sebelumnya.” Bobby sependapat dengan perubahan sistem tata kelola keamanan maritim menjadi SAMT melalui *omnibus law*, dengan alternatif revisi UU Kelautan yang saat ini sedang berjalan.

Penguatan upaya juga dilakukan paslon nomor urut 03 dengan “mengembangkan sektor kemaritiman menjadi prioritas utama sesuai dengan visi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari,” kata anggota Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Jaleswari Pramodhawardani.

Lebih lanjut Jaleswari menilai, “perlu pembahasan lebih lanjut mengenai Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut sebagai *omnibus law*.” Melalui cara itu, katanya kemudian, “kita dapat menjawab ancaman tradisional dan non-tradisional.”

I Made Andi Arsana, pakar geodesi dan geospasial hukum laut Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta mengapresiasi pandangan perwakilan masing-masing paslon. Ia secara khusus mengingatkan pentingnya “harmonisasi hukum guna menghindari ketidaksamaan prinsip mendasar dalam memperkuat keamanan laut.”

Menurut Andi, “terlalu banyak instansi yang berurusan dengan laut” yang, baginya, “dapat disederhanakan lewat *single agency multi task*.” Kendati begitu, yang kerap terjadi, “justru muncul instansi baru yang akhirnya justru memperumit koordinasi.” Andi juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik mengenai LCS sehingga semua orang dapat melihat dan mengawasi, sekaligus juga agar isu ini menjadi isu yang menjadi perbincangan publik, “seperti *blockchain*”.

Di lain sisi, pakar hukum internasional dan kebijakan keamanan maritim Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Arie Afriansyah menilai “sudah saatnya Indonesia memiliki kepemimpinan yang kuat, khususnya menyangkut keamanan laut. Kebijakan mengenai laut yang diambil oleh Indonesia akan memberikan pengaruh secara global.” Arie melanjutkan bahwa perdebatan mengenai *single agency* dan *multi agency* sebaiknya ditinggalkan karena PP 13 tahun 2022 dan Perpres 59 Tahun 2023 telah memberikan arah yang baru yaitu sistem keamanan laut dengan “*synergized patrol & multi-door approach*.”



Merespons paparan masing-masing perwakilan timses yang mengacu pada laporan deteksi dan analisis terbaru oleh tim periset keamanan maritim, IOJI merekomendasikan sepuluh upaya penguatan keamanan laut yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia:

1. Mempublikasikan titik-titik koordinat batas ZEE Indonesia-Vietnam yang telah disepakati pada Desember 2022.
2. Menindak tegas kapal-kapal ikan Vietnam yang melakukan illegal fishing di Indonesia, termasuk mencegah kapal Pemerintah Vietnam yang rutin berpatroli di garis Landas Kontinen Indonesia-Vietnam.
3. Menyelidiki kapal angkut ikan Berbendera Tiongkok, Fu Yuan Yu F77 yang terindikasi mempraktikkan illegal transshipment dan deaktivasi AIS selama berada di Laut Arafura.
4. Meminta klarifikasi Pemerintah Tiongkok mengenai dugaan aktivitas riset kelautan yang dilakukan kedua kapal riset mereka di Laut Natuna Utara, serta mengambil langkah-langkah diplomatik dan hukum yang tegas merespons aktivitas riset yang merugikan Indonesia.
5. Menindak tegas pelanggaran penangkapan ikan oleh kapal Indonesia dengan jaring tarik berkantong pada jalur di bawah 12 mil.
6. Melakukan kajian komprehensif terhadap penggunaan jaring tarik berkantong untuk mengetahui tingkat keramahan alat tangkap terhadap ekosistem laut.
7. Memperkuat sistem keamanan laut dengan peningkatan *3A+1 Abilities*, yaitu kemampuan mendeteksi (*ability to detect*), kemampuan merespon tepat dan cepat hasil pendeteksian (*ability to respond*), kemampuan menghukum (*ability to punish*), dan kemampuan untuk mengatasi ancaman keamanan laut melalui kerja sama internasional.
8. Mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan tentang keamanan laut guna memperkuat koordinasi dan sinergitas penegakan hukum di laut.
9. Memperkuat literasi akan isu keamanan laut melalui pelibatan jurnalis, peneliti, dan generasi muda Indonesia.
10. Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, di antaranya melalui percepatan pendataan nelayan kecil agar mendapatkan kartu nelayan, kemudahan akses permodalan dan asuransi.

Selain itu, ketiga anggota tim pemenang juga menyampaikan perlunya Omnibus Law Keamanan Laut untuk memperkuat sistem keamanan laut Indonesia. Omnibus Law mengenai keamanan laut perlu dijaga agar cakupannya tetap spesifik tentang penguatan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Proses penyusunan Omnibus Law ini juga perlu mengedepankan penilaian risiko dan dampak (*regulatory impact assessment*) dan ruang partisipasi masyarakat yang hakiki (*genuine public participation*).



INDONESIA  
OCEAN JUSTICE  
INITIATIVE

*Untuk informasi lebih lanjut dan permintaan wawancara, silakan hubungi: Anastasia Ika, [info@oceanjusticeinitiative.org](mailto:info@oceanjusticeinitiative.org), +62 811-8460-065*

*IOJI adalah lembaga think-tank dan advokasi kebijakan yang mendukung Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, untuk mewujudkan tata kelola kelautan dengan berlandaskan prinsip perlindungan yang efektif, pemanfaatan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan yang berkeadilan. IOJI membangun kolaborasi dengan aktor negara dan non negara untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, regional dan internasional dengan menyediakan berbagai usulan kebijakan berbasis bukti ilmiah. IOJI juga melakukan kerja pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang penghidupannya bergantung pada laut, seperti nelayan kecil, nelayan perempuan, nelayan buruh, warga pesisir dan awak kapal perikanan migran, dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka.*